



Realisasi Penerimaan PBB Baru 50 Persen

Wajib Pajak Bisa Gunakan Layanan Qrisna

JOGJA - Masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan telah mendekati jatuh tempo, yakni 30 September. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Wasesa mengingatkan para wajib pajak untuk segera membayar PBB.

Dia menyebut realisasi penerimaan PBB saat ini baru sekitar 50 persen. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh para wajib pajak yang

cenderung membayarkan PBB saat mendekati jatuh tempo. "Jadi sebaiknya di sisa waktu sebulan ini segera dibayarkan agar tidak lupa nanti jatuh tempo," ujar Wasesa, kemarin (3/9).

Dia menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sebanyak 96.426 lembar. Sementara penerimaan PBB Kota Jogja tahun 2023 ditargetkan mencapai sekitar Rp 104 Miliar.

Pihaknya juga melakukan upaya jemput bola untuk melakukan pelayanan di wi-

layah. Ini untuk memberi kemudahan bagi para wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Pelayanan jemput bola ini berbasis kelurahan. Dikemas dalam Pekan Pembayaran PBB setiap Rabu. Pekan pembayaran PBB di wilayah dilakukan dengan mobil pelayanan dari perbankan terkait. "Karena kami tidak boleh menerima uang (langsung pembayaran pajak), jadi harus lewat bank atau kantor pos," tambahnya.

Dia mengatakan masyarakat kini bisa memanfaatkan layanan Quick Response Code Indonesian Standards Dinamis

(Qrisna). Ini merupakan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi secara digital lewat Aplikasi JSS. "Monggo fasilitas ini segera dimanfaatkan karena sangat mudah dan tidak salah ketik. Kalau ini, begitu Qris-nya dipindai itu sudah jelas nilainya berapa," kata Wasesa.

Kabid Sistem Informasi dan Strategi Komunikasi Diskominfosan Kota Jogja Joko Marwiyanto menuturkan fitur Qrisna terintegrasi dengan data base tagihan pajak dan retribusi daerah. "Caranya akses Aplikasi JSS. Lalu memilih jebis pa-

jak dan retribusi yang akan dibayar. Misalnya, PBB berarti masukkan nomor objek pajaknya. Nanti akan keluar nominal tagihan pajak termasuk tunggakannya," jelas Joko.

Usai memindai kode Qris dinamis melalui fitur Qrisna, pembayaran bisa dilakukan melalui semua mobile banking, fintech, dan domper digital lainnya. "Karena Qrisna termasuk layanan pemerintah berdasarkan aturan Bank Indonesia (BI) maka tidak termasuk kena tambahan biaya untuk pembayaran," ujarnya. (**isa/din/er**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005